



BAGAIMANA KECURANGAN TERJADI DI ORGANISASI PUBLIK?

¹⁾Hendi Prihanto ²⁾Watriningsih

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

²⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^{1) 2)}Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Email: ¹⁾hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id ²⁾watri_ayu@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terjadinya kecurangan yang dipengaruhi oleh faktor kompetensi, kepemimpinan, kode etik dan implementasi teknologi informasi yang dilakukan dan terjadi khususnya terhadap sejumlah lembaga pemerintahan seperti kementerian dan lembaga setingkat lainnya yang merupakan populasi dalam penelitian ini. Teknik penarikan sampel digunakan secara acak atau *random* berdasarkan pada lembaga pemerintah yang pernah mengalami kasus kecurangan, dengan target waktu yang ditentukan oleh peneliti selama bulan Oktober 2019-Februari 2020 dengan menggunakan media kuesioner persepsi tertutup dengan dua model yaitu berbasis kertas dan media virtual Google formulir yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp dengan skala persepsi Likert (1-5). Keseluruhan sampel total yang diperoleh dan dapat diolah setelah melalui verifikasi sejumlah 200 responden. Metode analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen serta regresi berganda linear. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam observasi berpengaruh positif dan signifikan serta dapat menjadi prediksi penyebab terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan, dengan tingkat kemampuan mempengaruhi faktor terjadinya kecurangan sebesar 52.3 %. Penelitian berkontribusi terhadap pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan mengetahui dan mendeteksi gejala yang membuat seseorang mampu untuk melakukan kecurangan. Aspek teoritis penelitian mampu untuk mengembangkan konsep-konsep dalam mendeteksi kecurangan yang lebih kompleks, sehingga diperoleh konsep dan strategi dalam teoritis dalam melakukan pencegahan sehingga organisasi tidak mengalami kerugian dan kehilangan aset.

Kata kunci: Kecurangan, Kompetensi, Kode Etik, Kepemimpinan, dan Teknologi Informasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan atau *Fraud* dikenal sebagai tindakan tidak jujur yang sengaja dilakukan untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) mengategorikan menjadi tiga tipe besar dari *fraud*, yaitu: korupsi, pencurian aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan merupakan tindakan yang tidak mengenal kaya dan miskin, pejabat ataupun bukan pejabat, berpengetahuan ataupun tidak berpengetahuan karena banyak tindakan ini banyak dilakukan oleh mereka yang berpendidikan, memiliki jabatan dan kekuasaan serta tidak kekurangan dalam materi serta ekonomi (Tuanakotta, 2007). Adanya berbagai bentuk kecurangan membawa kerugian terhadap organisasi dan publik, untuk itu sangat perlu dilakukan kajian dan penelitian terus menerus untuk memahami perilaku kecurangan tersebut dan kemudian melakukan pencegahan. Laporan tahunan KPK (2004-2018) menyatakan bahwa tindakan korupsi paling banyak terjadi pada kementerian dan lembaga negara RI yang ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Lembaga Pemerintah Yang Teridentifikasi Korupsi (Tahun 2004-2018)

INSTANSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
DKP/RI					7	10	7	2	6	2	2	3	15	9	4	67
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	26	21	39	31	47	321
BUMN/BUMD		4			2	5	7	3	1			5	11	13	5	56
Komisial		9	4	2	2		2	1								20
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4		3	13	4	11	18	13	15	29	128
Pemkab/Pemkot			4	6	16	5	6	7	10	16	19	10	21	53	114	295
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	69	121	199	667

Sumber: Laporan Tahunan KPK

(<https://www.kpk.go.id/id/regulasi-tipikor/808-lampiran-laporan-tahunan-kpk-2018>)

1.2. Masalah

Pada hakikatnya tidak ada satu pun organisasi sektor publik maupun swasta yang memiliki kekebalan atau resistensi terhadap tindak kecurangan, dengan demikian sebenarnya semua organisasi rentan, berpotensi dan terkena dampak tindak kecurangan setiap saat (Holmes, Strawser, & Welch, 2000). Kemudian akibat dari perilaku kecurangan pada sektor publik akan sangat parah dan membahayakan karena berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Adebisi & Gbegi, 2015). Perilaku korupsi pada lembaga publik yang dilakukan oleh para penghuni organisasi merupakan hasil dari pengelolaan organisasi yang tidak baik atau kurang profesional pada organisasi tersebut, sehingga memicu tindakan kecurangan tersebut (Mensah & Zutter, 2017). Untuk itu bukan hanya diperlukan tata kelola, namun lebih jauh diperlukan juga *Good Governance* yang merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang efisien dan efektif, berupaya menghindari pengalokasian dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif dengan menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *politican framework* yang diperuntukkan bagi tumbuhnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat publik yang bebas dari korupsi (Ndraha, 2007).

Kompetensi atau kemampuan merupakan syarat utama seseorang mampu melakukan korupsi ataupun kecurangan dengan adanya kapabilitas (kemampuan), pengalaman dan keahlian merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak korupsi (Crowe, 2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004; Yusof, 2016). Kapabilitas dapat menjadi faktor utama selain faktor lainnya karena hal tersebut melekat pada dirinya yang menandakan keberhasilan dari kemampuan seseorang yang digunakan dalam melakukan aksi dan tindakannya. Untuk itu pada setiap orang yang terikat dalam hubungan kerja dengan organisasi perlu diterapkan kode etik yang membatasi hak dan kewajibannya dalam bekerja.

Kode etik penting artinya dalam menjaga perilaku setiap orang di dalam organisasi, maka terjadinya banyak kecurangan dalam organisasi karena lemahnya penerapan pengendalian internal dan kurangnya nilai-nilai etika perilaku pegawai atau karyawan yang baik, sehingga menjadi penyebab organisasi teridentifikasi korupsi karena perilaku dari karyawannya (Chen, Cumming, Hou, & Lee, 2013). Untuk itu dengan adanya kebijakan dalam etika serta penerapan kode etik yang kurang baik, akan mampu untuk memicu terjadinya berbagai kecurangan (Law, 2011; Said, Alam, Ramli, & Rafidi, 2017; Siregar & Tenoyo, 2015) melalui sejumlah pelanggaran etika dan norma. Penerapan kode etik tidak terlepas dari peran kepemimpinan dalam suatu organisasi, karena adanya pemimpin mampu untuk mempengaruhi para pengikutnya menjadi lebih baik membawa organisasi dalam pencapaian tujuan, visi dan misi.

Kepemimpinan yang baik akan berkontribusi pada organisasi menjadi lebih baik dengan mencapai kinerja unggul yang diharapkan serta menghindari semua bentuk kecurangan (Ferry & Ahrens, 2016), namun sebaliknya dengan etika pemimpin yang buruk maka organisasi akan dilanda kemunduran bahkan kegagalan pada kinerja (Rahim, Nawawi, & Salin, 2017) dan banyaknya terjadi perilaku curang dalam organisasi (Ahmad & Hall, 2017; Asmuni, Nawawi, & Salin, 2015; Omari & Paull, 2015). Permasalahan korupsi organisasi di Indonesia banyak sekali yang justru dilakukan oleh pemimpinnya (Prihanto & Gunawan, 2020) dikarenakan mereka memiliki kekuasaan yang dimiliki (Tang, Zhan, & Chen, 2018) dan jabatan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka. Selain kepemimpinan peran teknologi dan informasi yang memadai atau tertinggal sekalipun dapat disalahgunakan, dan akan menjadikan organisasi lebih mudah teridentifikasi kecurangan, karena organisasi yang menggunakan teknologi tradisional rentan melakukan korupsi dan kecurangan (Halbouni, Obeid, & Garbou, 2016).

Penerapan sistem informasi teknologi memiliki dua sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan apabila disalahgunakan untuk membantu melakukan aksi kecurangan dan korupsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa dalam menerapkan teknologi juga tidak memiliki kesamaan dan keberhasilan antara organisasi ataupun negara yang satu dengan lainnya (Chen, Cumming, Hou, & Lee, 2013; Sharma & Panigrahi, 2012; Kapoor, Zhou, & Piramuthu, 2011). Penerapan teknologi di era *online* saat ini menjadi sangat berbahaya apabila tidak ditempatkan pada penggunaan yang semestinya, karena justru akan digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan yang merugikan organisasi. Prihanto & Gunawan, (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi di beberapa organisasi publik di Indonesia belum maksimal, sehingga teknologi justru dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan oleh para penduduk dalam organisasi maupun pihak lain di luar organisasi.

1.3. Tujuan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejumlah faktor yang melalui aspek teori yang diprediksi berpotensi untuk menimbulkan perilaku kecurangan yang merugikan organisasi melalui sejumlah persepsi seperti: kompetensi, kode etik, kepemimpinan dan teknologi informasi sebagai pemicu terjadinya korupsi dalam lembaga sektor publik khususnya dan lembaga non publik di Indonesia melalui penelitian empiris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Grand Teori

Organisasi sektor publik khususnya pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, melindungi mereka dari berbagai kejahatan dan memenuhi hajat kebutuhan manusia tanpa merugikan orang lain secara tidak sah, karena pemerintahan sesungguhnya anti untuk melakukan kecurangan (Ndraha, 2007). Namun pada kenyataannya sering kali terjadi ketidakselarasan antara aspek teoritis dan praktisnya, sehingga para aparat pemerintah sering kali terlibat dalam perilaku kecurangan yang diakibatkan karena konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan pada organisasi pemerintah terjadi manakala pemerintah sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola negara, tidak menjalankan kewajiban selaku penyelenggara negara untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya (prinsipal). Hal tersebut terjadi manakala pemerintah memiliki konflik atas kepentingan yang bertujuan memuaskan diri sendiri maupun sekelompok orang pada kelompoknya.

2.2. Kecurangan

Pritchard, Havitz, & Howard (2015) menyatakan bahwa korupsi dapat dilakukan dengan tindakan yang lazim terjadi diantaranya dengan memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *markup* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi yang dijelaskan IAI (2001) sebagai berikut:

- 1) *Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan* yaitu penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
- 2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Klitgaard (2001) mengatakan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Sedangkan penyebab terjadinya kecurangan yang diidentifikasi oleh Cressey (1965) yaitu: adanya kesempatan, insentif dan pembenaran pada perilaku dan tindakan seseorang (*Fraud Triangle*).

2.3. Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sejajar atau sama dengan kemampuan, maka dapat diartikan pengetahuan memahami tujuan bekerja, pengetahuan dalam melaksanakan kiat-kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami betapa pentingnya disiplin dalam organisasi menunjang agar semua aturan dapat berjalan dengan baik (McAshan, 1981). Kompetensi merupakan kemampuan yang ada pada manusia yang dapat diperoleh secara alami, maupun diperoleh melalui pembelajaran secara khusus. Kompetensi sebagai suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan tersebut ditentukan bukan hanya faktor intelektual namun juga fisik (Robbins, 2007). Kompetensi memiliki peran penting dalam terjadinya kecurangan, karena tanpa ada kompetensi maka seseorang tidak akan mampu untuk melakukan kecurangan dan dari beberapa literatur penelitian diperoleh penyebab kecurangan disebabkan karena kompetensi yang disalahgunakan (Crowe, 2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004; Yusof, 2016).

2.4. Kode etik

Etika merupakan seperangkat aturan yang berisi prinsip moral mengatur perilaku manusia (individu dan kelompok) tertentu yang dianut (Guy, 2002). Kemudian (Mulyadi, 2001) menyebutkan setidaknya ada delapan prinsip-prinsip dasar etika pada suatu profesi yaitu:

- 1) Bertanggung jawab pada profesi adalah sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
- 2) Mengutamakan kepentingan publik dimana profesi (akuntan) yang terdiri dari klien, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan dan pihak lainnya yang bergantung kepada obyektivitas dan integritas dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik.

- 3) Berintegritas, bahwa setiap aparat harus bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan karena keuntungan pribadi (*conflic of interest*).
- 4) Objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa diberikan anggota yang mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.
- 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan.
- 6) Kerahasiaan merupakan sikap menjaga setiap kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
- 7) Perilaku profesional mewajibkan aparat harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
- 8) Standar teknis dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan dengan keahliannya dan menerapkan kehati-hatian melalui prinsip integritas dan obyektivitas.

2.5. Kepemimpinan

Dalam studi dan kajian bidang akuntansi penelitian dengan topik kepemimpinan jarang sekali dilakukan (Copeland, 2015). Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan dengan menggunakan kekuasaan yang mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan berbagai hal seperti: interpretasi pengikut pada kejadian, organisasi, aktivitas kerja, komitmen terhadap tujuan, kerja sama, akses pada dari unit lain (Colquitt, LePine, & Wesson., 2011). Kemudian kepemimpinan akan menjadi efektif apabila sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti *personality*, *ability*, dan *capability* (Ivancevich, 2008) menyatakan:

- 1) *Ability* merupakan latar belakang pemimpin mengenai tingkat kemampuan seperti: pengetahuan keahlian dan keterampilan baik yang diperoleh secara formal non formal maupun bersumber dari pengalaman pribadi yang bermanfaat bagi kepemimpinannya.
- 2) *Capability* merupakan kondisi mental psikologis seseorang pemimpin yang mencerminkan kemandirian dan kesanggupan penuh untuk memikul segala konsekuensi jabatan dan kepemimpinan.
- 3) *Personality* merupakan pancaran dari karakter pemimpin itu sendiri, yang menyangkut sifat atau watak yang melekat pada dirinya. *Personality* terbentuk dari sifat-sifat genetis maupun lingkungan pendidikan karena merupakan hal yang bersifat bawaan sejak lahir atau keturunan.

2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem teknologi informasi dianggap sangat berpengaruh dan sering digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi yang merupakan pemikiran dari *Technology Acceptance Model* (TAM) dikemukakan oleh Davis (1989). Lebih lanjut Davis (1989) menyatakan bahwa TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel yaitu: persepsi manfaat (*perceived*

usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Penerimaan pemakai terhadap sistem teknologi informasi sebagai bentuk kemauan yang terlihat didalam kelompok pengguna untuk menerapkan sistem teknologi informasi tersebut dalam pekerjaannya. Semakin mereka menerima sistem teknologi informasi yang baru, maka semakin besar kemauan pemakai untuk mengubah praktik yang sudah ada dalam penggunaan waktu, serta usaha untuk memulai secara nyata pada sistem teknologi informasi yang baru yang membawa kemanfaatan dan efektif (Chin & Todd, 1995).

Rendahnya penggunaan sistem informasi diidentifikasi sebagai penyebab utama yang mendasari terjadinya *productivity paradox* yaitu investasi yang mahal dibidang sistem tetapi menghasilkan *return* yang rendah, karena pada hakikatnya setiap organisasi dan bangsa memiliki perbedaan dalam menerima dan merespons teknologi informasi. Akibat dari respons yang berbeda maka akan menghasilkan perbedaan pula efektivitas kinerja yang dihasilkan (Chen et al., 2013; Sharma & Panigrahi, 2012; Kapoor, Zhou, & Piramuthu, 2011). Untuk itu penerapan teknologi informasi yang efektif harus didasarkan pada budaya yang dianut oleh setiap komunitas, organisasi maupun suatu negara.

2.7. Pengembangan Hipotesis

A. Kompetensi Dan Kecurangan

Kompetensi merupakan modal penting bagi seseorang karena dipandang sebagai kemampuan dalam mengelola sesuatu yang terkait dengan bidangnya. Kompetensi juga merupakan suatu kecakapan, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tugas di suatu bidang, kompetensi biasanya sesuai dengan jabatan yang diduduki seseorang. Adanya pengetahuan tentang tugas yang spesifik dan pengalaman melalui pelatihan yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi berkualitas namun dapat juga menimbulkan kesempatan melakukan kecurangan (Widiyastuti & Pamudji, 2009). Sejalan dengan pernyataan tersebut (Crowe, 2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004; Yusof, 2016) juga membuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan seseorang karena kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian satu (H1) dapat dikemukakan sebagai berikut:

H1: Kompetensi yang tidak digunakan dengan baik akan menyebabkan terjadinya kecurangan.

B. Kode Etik Dan Kecurangan

Kode etik sangat penting artinya dalam membatasi perilaku seseorang yang berkaitan statusnya sebagai penghuni organisasi. Kode etik menggambarkan bagaimana sikap dan perilaku aparat terhadap pekerjaan sehari-harinya. Kode etik berpengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan, artinya kode etik yang tidak dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik sesuai pedoman maka berpotensi membuat organisasi terindikasi kecurangan (Chen et al., 2013; Law, 2011; Said et al., 2017; Siregar & Tenoyo, 2015), bahwa kebijakan kode etik yang diabaikan dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya merupakan penyebab terjadinya kecurangan pada organisasi. Oleh karenanya hipotesis dua (H2) dapat dikemukakan sebagai berikut:

H2: Kode etik yang tidak diterapkan dan diimplementasikan dengan baik dapat menyebabkan terjadinya kecurangan.

C. Kepemimpinan Dan Kecurangan

Kepemimpinan sangat penting artinya dalam mengelola organisasi terlebih organisasi sektor publik dengan ukuran yang cukup besar. Prihanto & Gunawan (2020) menyatakan permasalahan korupsi dan kecurangan di Indonesia pada organisasi sektor publik lebih banyak justru dilakukan oleh para pimpinan. Organisasi dengan kepemimpinan yang baik akan menjadikan organisasi tersebut menjadi semakin baik dalam mencapai kinerja berkualitas yang diharapkan, serta dapat terhindar dari berbagai bentuk kecurangan (Ferry & Ahrens, 2016). Sebaliknya dengan kualitas etika dari pemimpin yang buruk maka organisasi akan mudah dilanda masalah kecurangan yang berakibat pada kegagalan kinerjanya (Ahmad et al., 2016; Asmuni et al., 2015; Omar, Nawaw, & Salin, 2016; Rahim et al., 2017). Kecurangan yang dilakukan pemimpin dikarenakan mereka memiliki kekuasaan yang dimiliki (Tang et al., 2018) dan jabatan yang dengan leluasa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka. Dengan semakin baiknya kualitas suatu kepemimpinan maka akan menjadikan organisasi terhindar dan mampu mengendalikan kecurangan. Oleh karena itu hipotesis tiga penelitian (H3) dapat dikemukakan sebagai berikut:

H3: Kepemimpinan yang tidak efektif dan berkualitas dalam organisasi akan menyebabkan terjadinya kecurangan.

D. Teknologi Informasi Dan Kecurangan

Teknologi informasi merupakan sarana yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan kinerja organisasi. Dalam melakukan pencegahan perilaku korupsi dalam suatu organisasi sangat diperlukan peran teknologi dan informasi yang memadai, karena organisasi yang menggunakan teknologi tradisional rentan melakukan korupsi dan kecurangan (Halbouni et al., 2016). Penerapan sistem informasi teknologi memiliki dua akibat yang dapat menguntungkan bagi organisasi namun sekaligus merugikan apabila disalahgunakan untuk melakukan tindakan kecurangan dan korupsi. Sehingga dalam menerapkan teknologi antara organisasi maupun negara juga belum tentu memiliki kesamaan dan keberhasilan satu dengan lainnya (Chen et al., 2013; Sharma & Panigrahi, 2012; Kapoor et al., 2011). Teknologi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya akan membawa permasalahan pada organisasi karena rentan dan berpotensi terjadi kecurangan didalamnya, untuk itu hipotesis penelitian empat dapat dikemukakan sebagai berikut:

H4: Teknologi yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan menyebabkan terjadinya kecurangan keuangan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif hubungan kausal (sebab akibat) dengan metode penelitian jenis kuantitatif. Peneliti menggunakan skala persepsi dari masing-masing responden yang kemudian diberikan bobot penilaian mulai dari 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (kurang setuju); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju) dalam bentuk kuesioner tertutup yang disebarakan melalui kuesioner berbasis kertas dan juga menggunakan kuesioner berbasis virtual yaitu Google formulir dengan menggunakan WhatsApp.

3.2. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan

Populasi dalam penelitian ini adalah kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya yang ada di Indonesia dengan kedudukan dan berlokasi di DKI Jakarta. Sampel penelitian ini adalah ASN

(Aparatur Sipil Negara) pada kementerian tersebut yang diambil secara acak oleh peneliti berdasarkan pada informasi yang diperoleh peneliti, dan tergolong sebagai organisasi yang pernah mengalami dan terlibat dalam tindak kecurangan sebagai unit analisis yang diperoleh dari media berita internet. Jumlah kuesioner yang dibagikan secara acak pada institusi pemerintah adalah sebanyak 150 buah dan selebihnya menggunakan Google formulir untuk media pengisian yang dibatasi pada waktu penelitian mulai bulan Oktober 2019 - Februari 2020.

3.3. Pengukuran

Kecurangan dikemukakan oleh Cressey (1965) sebagai *fraud Triangle* menyatakan bahwa kecurangan mempunyai tiga faktor utama penyebab pendukung terjadinya yaitu: a) Tekanan; b) Kesempatan; dan c) Rasionalisasi.

Kompetensi menurut Gordon (1988) menyatakan bahwa kompetensi sebagai penugasan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan yang terdiri dari: a) Pengetahuan; b) Pemahaman; dan c) Keterampilan

Kode Etik dikemukakan oleh Sihwahjoeni & Gudono (2000) menyatakan bahwa kode etik dalam profesi akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Indikator dari kode etik yaitu terdiri dari: a) Tanggung jawab; b) Integritas; dan c) Obyektivitas

Kepemimpinan menurut Ivancevich (2008) menyatakan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang efektif terdiri dari a) *Intelligence*; b) *Personality*; dan c) *Abilities*

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam persepsi Davis (1989) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari dua perspektif yang dikenal dengan TAM yaitu: a) Persepsi Manfaat; dan b) Persepsi Kemudahan

3.4. Teknik Analisis Data

A. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), simpangan baku (standar deviasi), variansi, selain juga digunakan *skewness* (kecondongan), dan kurtosis (keruncingan) dari masing-masing variabel penelitian.

B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan valid dan reliabel, maka perlu dilakukan pengujian validitas untuk melihat nilai *Correlated Item-Total Correlation*, lalu membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* (*df*) = $n - 2$, yang dimaksud dengan *n* adalah jumlah sampel. Jadi *df* yang digunakan yaitu $200 - 2 = 198$ dengan angka sebesar 5%, maka menghasilkan nilai *r* tabel sebesar 0.138. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil relatif tidak

berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama dengan asumsi nilai *Cronbach Alpha* > 0.60.

C. Regresi Linier Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya), maka persamaan yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kec} = \alpha + \beta_1 \text{KOMP} + \beta_2 \text{KOD} + \beta_3 \text{KEP} + \beta_4 \text{TEK} + e$$

Keterangan:

Kec	: Kecurangan
KOMP	: Kompetensi
KOD	: Kode etik
KEP	: Kepemimpinan
TEK	: Teknologi Informasi
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
e	: <i>Error</i>

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Jumlah kuesioner yang telah disebarakan selama bulan Oktober 2019 - Februari 2020 pada sejumlah organisasi pemerintahan (kementerian atau lembaga) tidak keseluruhan dapat terdistribusi dengan baik karena tidak semua responden bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut dengan berbagai alasan yang akan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Permasalahan penelitian dalam menggunakan pengumpulan data menggunakan kuesioner ini adalah tingkat partisipasi dari masyarakat yang masih belum maksimal karena belum pedulinya terhadap pentingnya penelitian. Namun demikian hasil yang diperoleh sudah mencukupi persyaratan untuk dilakukan pengolahan data dengan kondisi data sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

KETERANGAN	JUMLAH
Kuesioner fisik manual yang disebarakan	150
Kuesioner yang dikembalikan	137
Kuesioner yang layak digunakan	127
Kuesioner menggunakan google formulir diperoleh	75
Kuesioner yang memenuhi syarat	73
Total kuesioner yang dapat digunakan	200

Sumber: Data Primer yang diolah

Statistik deskriptif merupakan suatu metode untuk mengorganisir, menyimpulkan, dan mempresentasikan data ke dalam suatu cara yang informatif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang ada. Dari analisis statistik deskriptif diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Deskriptif Statistik, Validitas, dan Reliabilitas

Variabel	Validitas	Reliabilitas	Ket.	Item	Min	Max	Mean	St.Dev
Kecurangan	r hitung > 0.138	0.695 > 0.60	Valid/Reliabel	6	20	30	23.92	2.43
Kompetensi	r hitung > 0.138	0.730 > 0.60	Valid/Reliabel	6	18	27	23.83	2.08
Kode etik	r hitung > 0.138	0.739 > 0.60	Valid/Reliabel	6	18	29	23.87	3.09
Kepemimpinan	r hitung > 0.138	0.712 > 0.60	Valid/Reliabel	6	18	29	23.80	2.26
Tek. Informasi	r hitung > 0.138	0.775 > 0.60	Valid/Reliabel	4	19	20	15.39	2.21

N = 200

Berdasarkan pada hasil pengolahan data di atas, analisis deskriptif yaitu perbandingan antara nilai *mean* yang lebih besar dari standar deviasi sehingga diperoleh nilai yang layak atas data. Kemudian uji validitas dan reliabilitas instrumen pada jumlah data (n) 200 diperoleh hasil yang layak untuk digunakan dalam pengolahan data selanjutnya berdasar pada kedua asumsi tersebut.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis Penelitian

Variabel	Koef. Regresi	eror	t	P value	Keterangan
Kompetensi	0.279	0.050	3.968	0.000****	signifikan
Kode etik	0.218	0.058	1.751	0.000****	signifikan
Kepemimpinan	0.256	0.032	3.113	0.002***	signifikan
Tek. Informasi	0.303	0.025	4.047	0.000****	signifikan
Konstanta (α)	: 5.656				
Error	: 1.819				
F	: 8.205			0.00	
R ²	: 0.523				

N = 200

Keterangan tingkat signifikansi:

* = 0.10, ** = 0.05, *** = 0.01, **** = 0.00

Untuk itu persamaan regresi yang menyatakan kenaikan setiap perubahan pada satu satuan nilai pada variabel penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$\text{Kec} = 5.656 (\alpha) + 0.279 \text{ KOMP} + 0.218 \text{ KOD} + 0.256 \text{ KEP} + 0.303 \text{ TEK} + 1819 \text{ E(eror)}$$

Setiap perubahan pada variabel ditunjukkan pada nilai koefisien tersebut di atas dengan nilai signifikansi dari keseluruhan variabel penelitian pada tingkat 0.00. Sehingga dari interpretasi data hasil pengolahan statistik menunjukkan bahwa keseluruhan variabel penelitian mampu digunakan sebagai pemerrediksi terhadap potensi terjadinya kecurangan.

4.2. Pembahasan

A. Kompetensi terhadap kecurangan

Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan, untuk itu hipotesis penelitian satu (H1) yang menyatakan bahwa kemampuan memiliki kontribusi pengaruh terhadap kecurangan dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh sejumlah peneliti tentang kecurangan (Crowe, 2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Yusof, 2016) yang membuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan

seseorang karena latar belakang kemampuan yang dimilikinya. Kompetensi merupakan modal penting bagi seseorang karena dipandang sebagai kemampuan dalam mengelola sesuatu yang terkait dengan bidangnya, tanpa adanya kemampuan maka seseorang akan sangat sulit melakukan penipuan. Kompetensi juga merupakan suatu kecakapan, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tugas di suatu bidang, kompetensi biasanya sesuai dengan jabatan yang diduduki seseorang. Adanya pengetahuan tentang tugas yang spesifik dan pengalaman melalui pelatihan yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi berkualitas, namun dapat juga menimbulkan permasalahan karena kesempatan melakukan kecurangan terbentang luas (Widiyastuti & Pamudji, 2009). Untuk itu kecurangan dapat terjadi apabila individu salah dalam menempatkan dan menggunakan kemampuan dan keahliannya. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi karena dilakukan oleh orang-orang yang profesional, memahami, berpengalaman terhadap liku-liku pekerjaan yang ditekuninya di berbagai bidang, sehingga mereka dengan mudah untuk kecurangan. Oleh karena itu perlu adanya distribusi dan pemanfaatan terhadap kemampuan seseorang untuk digunakan menjadi aspek yang positif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi saat ini dan dimasa mendatang serta mengantisipasi adanya perilaku yang menyimpang pada organisasi.

B. Kode Etik Terhadap Kecurangan

Kode etik merupakan instrumen yang membatasi para pelaku dalam organisasi dalam bertindak dan berperilaku untuk menunaikan kewajiban dan memperoleh haknya. Hasil penelitian dengan pengujian statistik menyatakan bahwa kode etik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan, dengan demikian hipotesis penelitian dua (H2) yang menyatakan bahwa kode etik yang tidak diterapkan dengan baik akan menyebabkan terjadinya kecurangan dapat diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Chen et al., 2013; Law, 2011; Said et al., 2017; Siregar & Tenoyo, 2015). Sementara itu pendapat Sihwahjoeni & Gudono (2000) menyatakan bahwa kode etik profesi akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik sangat penting sekali dalam implementasi karena menyangkut kerahasiaan, reputasi, lingkungan kerja, iklim, kinerja organisasi dan lain sebagainya yang dipegang dan dikuasai oleh para penduduk dalam organisasi. Kode etik membatasi seseorang dalam posisinya atau jabatannya dalam organisasi untuk berbuat etis sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan tidak berbuat sesuai kehendak hati dan selernya walaupun seorang pejabat penguasa sekalipun. Kode juga dibuat untuk menjamin tidak tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, karena pelaku kecurangan cenderung melakukan kecurangan dengan mengabaikan kode etiknya sebagai pekerja atau sebagai aparat yang seharusnya melayani publik dengan perilaku beretika. Untuk itu sebagai abdi negara, sudah seharusnya setiap aparat memahami kode etik yang diberikan dan mengikatnya sebagai anggota organisasi semenjak mereka menjadi pegawai pemerintah, untuk itu implementasi dan mengingatkan kembali kode etik bagi aparat sangat perlu dilakukan, karena kode etik adalah hal yang sangat mudah untuk diabaikan dan dilupakan ketika terjadi perubahan iklim dari organisasi.

C. Kepemimpinan Terhadap Kecurangan

Kepemimpinan adalah salah satu indikator keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya dan menuju organisasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian melalui statistik menyatakan bahwa kepemimpinan yang tidak efektif dalam organisasi cenderung berpengaruh positif dan

signifikan terhadap terjadinya kecurangan yang berarti hipotesis penelitian tiga (H3) dapat diterima. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prihanto & Gunawan, 2020) menyatakan permasalahan korupsi dan kecurangan di Indonesia pada organisasi sektor publik lebih banyak justru dilakukan oleh para pimpinannya. Seorang pemimpin dapat dinilai dari kualitas etika dari kepemimpinannya, apabila kepemimpinan tersebut berkualitas buruk maka organisasi akan mudah dilanda masalah kecurangan yang berakibat pada kegagalan kinerjanya (Ahmad et al., 2016; Asmuni et al., 2015; Omar et al., 2016; Rahim et al., 2017). Untuk itu organisasi dengan kepemimpinan yang baik akan menjadikan organisasi tersebut menjadi semakin baik dalam mencapai kinerja berkualitas yang diharapkan, karena kualitas organisasi yang baik dapat menghindarkan bentuk-bentuk kecurangan (Ferry & Ahrens, 2016). Hal penting lain yang harus diwaspadai adalah kekuasaan dan jabatan yang dimiliki seorang pemimpin membuat keleluasaan pemimpin dalam melakukan tindakan (Tang et al., 2018) dan tanpa disadari akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka yang menyebabkan konflik kepentingan, hal ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan deteksi atas perilaku pemimpin melalui cara observasi (Prabowo, 2016) yang dilakukan pada organisasi. Karena pentingnya faktor kepemimpinan bagi organisasi dalam menentukan nasib dikemudian hari, maka untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan uji kelayakan selain adanya perjanjian yang mengikat terkait dengan perilaku pemimpin (fakta integritas) yang sangat penting dalam memimpin organisasi yang membawa kemajuan organisasi.

D. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kecurangan

Pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara positif akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, karena teknologi informasi sebagai alat untuk membantu proses pekerjaan menjadi lebih mudah untuk dilakukan, namun sebaliknya teknologi juga mampu untuk mempermudah pelaku dalam melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian melalui pengujian statistik menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh positif dan signifikan pada penyebab terjadinya kecurangan, dengan demikian hipotesis penelitian empat (H4) penelitian dapat diterima. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Halbouni et al., 2016) bahwa penerapan teknologi yang modern apabila diimplementasikan dengan baik akan mendorong kinerja dan perkembangan positif pada organisasi, sistem informasi yang tradisional lebih cenderung mudah dimanipulasi dan menjadi penyebab kecurangan terjadi. Hakikatnya penerapan sistem informasi teknologi juga memiliki dua akibat yang dapat menguntungkan bagi organisasi namun sekaligus merugikan apabila disalahgunakan untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain itu penerapan teknologi antar negara dan organisasi memiliki dampak yang berbeda-beda (Chen et al., 2013; Kapoor et al., 2011; Sharma & Panigrahi, 2012) pada keberhasilan khususnya dalam perannya meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan sistem informasi di era modern saat ini memiliki potensi kerawanan tersendiri, karena banyak kejahatan yang terjadi dengan menggunakan sistem informasi yang memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan (Davis, 1989) pada sistem tersebut. Pelaku kejahatan siber dunia maya memanfaatkan teknologi sebagai pintu masuk dalam melakukan aksinya, sehingga apabila pengamanan dan perilaku pengguna yang tidak beretika akan memudahkan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan kejahatan pencurian dan lain sebagainya, untuk itu diperlukannya sistem pertahanan dan keamanan yang memadai sangat diperlukan oleh organisasi untuk melindungi aset dan informasi organisasi selain implementasi kode etik dalam menggunakan teknologi informasi tersebut disertai dengan ketegasan dari para pemimpin.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menyatakan bahwa keseluruhan variabel yang digunakan sebagai observasi dalam penelitian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada terjadinya kecurangan. Hal berarti kecurangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan publik dapat disebabkan karena faktor yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini (kompetensi, kode etik, kepemimpinan dan teknologi informasi). Sejumlah peristiwa terjadinya kecurangan yang terjadi di Indonesia banyak disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki pelaku, kode etik yang dilanggar oleh para pelaku selaku pejabat publik atau aparat pemerintah, kemudian pemimpin yang tidak amanah dalam menerima tanggung jawabnya, dan teknologi yang salah dalam penggunaannya merupakan faktor kuat yang menyebabkan kecurangan dapat terjadi pada lembaga pemerintah.

5.2. Saran

Hasil penelitian menyarankan secara teoritis untuk pengembangan teori adalah menggunakan variasi model yang mampu mendeteksi kecurangan yang mungkin belum dapat dieksploitasi dalam penelitian ini, sehingga diperoleh pengembangan baru dalam mendeteksi kecurangan yang semakin berkembang di era modern saat ini dengan berbagai perubahan yang cukup signifikan dalam praktik organisasi, adanya faktor yang menyebabkan korupsi pada pengujian variabel mampu merekomendasi pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu penelitian juga menyarankan bagi pemerintah dan komisi pemberantasan korupsi untuk mengantisipasi terjadinya dilingkungan pemerintahan dengan melakukan pencegahan lebih efektif melalui faktor yang digunakan dalam penelitian maupun faktor lain yang berpotensi menjadi penyebab aparat melakukan kecurangan. Perlunya antisipasi dan penguatan pada aspek kepemimpinan, implementasi kode etik dan pembatasan penggunaan terhadap teknologi yang membantu operasional organisasi dan keberlanjutannya.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian menggunakan kuesioner adalah konsistensi data yang mungkin kurang sesuai karena berdasarkan persepsi seseorang yang dapat bersifat subjektif terhadap keberpihakan atau rasa suka maupun tidak suka pada penilaian yang dilakukan terhadap seseorang. Tingginya subjektivitas dapat ditekan dan diminalisir dengan melakukan penambahan pada sampel atau responden penelitian sehingga diperoleh jumlah yang representatif. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel *random* berdasarkan responden yang tersebar di berbagai lembaga pemerintahan yang berbeda yang dibatasi oleh waktu penyebarannya yang tidak merata, sehingga hasil yang diperoleh tidak mampu menyimpulkan perilaku kecurangan pada satu objek penelitian yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). *Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse*.
- Adebisi, J. F., & Gbegi, D. . (2015). Fraud and the Nigerian Public Sector Performance : The Need for Forensic Accounting. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 5(5), 67–78.
- Ahmad, I., Basra, S. M. A., Akram, M., Wasaya, A., Hussain, S. A., Iqbal, A., & 1Soil. (2016).

Alleviation of oxidative stresses by potassium fertilizer in spring maize under early and late sown conditions. *Bangladesh Journal Of Scientific And Industrial Research*, 51(2), 101–110.

- Ahmad, M., & Hall, S. G. (2017). Trust-based social capital, economic growth and property rights: explaining the relationship. *International Journal of Social Economics*, 44(1), 21–52. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2014-0223>
- Asmuni, A. I. ., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2015). Ownership Structure and Auditor ' s Ethnicity of Malaysian Public Listed Companies. *Social Sciences & Humanities*, 23(3), 603–622.
- Chen, A. S., & Hou, Y. (2015). The effects of ethical leadership , voice behavior and climates for innovation on creativity : A moderated mediation examination. *The Leadership Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.10.007>
- Chen, J., Cumming, D., Hou, W., & Lee, E. (2013). Executive integrity , audit opinion , and fraud in Chinese listed fi rms ☆. *Emerging Markets Review*, 15, 72–91. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.12.003>
- Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the Use , Usefulness , and Ease of Use of Structural Equation Modeling in MIS Research : A Note of Caution. *Management Information Systems Research Center*, 19(2), 237–246.
- Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Wesson., M. J. (2011). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Copeland, M. K. (2015). The Importance of Ethics and Ethical Leadership in the Accounting Profession. *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting*.
- Cressey, D. R. (1965). The Respectable Criminal. *Criminologica*, 13–16.
- Crowe, H. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough. In *IN Howart, Crowe*.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*, 13(3), 319–340.
- Ferry, L., & Ahrens, T. (2016). Using management control to understand public sector corporate governance changes: localism, public interest, and enabling control in an English local authority. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Gordon. (1988). *Pembelajaran Kompetensi*. Rineka Cipta.
- Guy, D. . (2002). *Auditing*. (Sugiyarto, Ed.) (Jilid II). Jakarta: Erlangga.
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), 589–628. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163>
- Holmes, S. A., Strawser, J. W., & Welch, S. T. (2000). Fraud in the governmental and private sectors Article information : *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 12(3), 345–369.
- Ivancevich, J. (2008). *Perilaku dan Manajemen Organisasi* (1st ed.).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs

and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Kapoor, G., Zhou, W., & Piramuthu, S. (2011). Multi-tag and multi-owner RFID ownership transfer in supply chains. *Decision Support Systems*, 52(1), 258–270. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.08.002>
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi* (Cetakan ke). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Law, P. (2011). Corporate governance and no fraud occurrence in organizations: Hong Kong evidence. *Managerial Auditing Journal*, 26(6), 501–518. <https://doi.org/10.1108/02686901111142558>
- McAshan, H. H. (1981). *Competency-based education and behavioral objectives*. Eaglewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, Inc.
- Mensah, B. K. A., & Zutter, C. J. (2017). The relationship between corporate governance, corruption and forward-looking information disclosure: a comparative study. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(2), 284–304. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2015-0150>
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. (Edisi Tiga, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ndraha, T. (2007). *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*. Tangerang Banten: Sirao Credentia.
- Omar, M., Nawaw, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The causes, impact and prevention of employee fraud - a case study of an automotive company. *Journal of Financial Crime*, 23(4).
- Omari, M., & Paull, M. (2015). Public sector work intensification and negative behaviors. *Journal of Organizational Change Management*, 28(4).
- Prabowo, H. Y. (2016). Sight beyond sight: foreseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2).
- Prihanto, H., & Gunawan, I. D. (2020). Corruption in Indonesia (Is It Right to Governance, Leadership and It to Be Caused ?). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 11(2), 56–65.
- Pritchard, M. P., Havitz, M. E., & Howard, D. R. (2015). Analyzing the Commitment-Loyalty Link in Service Contexts. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27(3), 333–348. <https://doi.org/10.1177/0092070399273004>
- Rahim, S. A. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2017). Internal control weaknesses in a cooperative body: Malaysian experience. *Int. J. Management Practice*, 10(2), 131–151.
- Robbins, S. (2007). *Manajemen* (Edisi Kede). Jakarta: PT Indeks.
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170–184. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>
- Sharma, A., & Panigrahi, P. K. (2012). A Review of Financial Accounting Fraud Detection based on Data Mining Techniques. *International Journal of Computer Applications*, 39(1), 37–47.
- Sihwahjoeni, & Gudono. (2000). Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 3(2).
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal*

of Financial Crime, 22(3), 329–346. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016>

- Tang, Y., Zhan, X., & Chen, K. (2018). Differential leadership and organizational corruption in China: Mediating role of moral disengagement and moderating role of organizational justice. *Chinese Management Studies*, 12(4), 795–811. <https://doi.org/10.1108/CMS-12-2017-0344>
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Umar, H. (2016). *Corruption The Devil*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Vousinas, G. L. (2019). Elaborating on the theory of fraud: New theoretical extensions. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 1–17.
- Widiyastuti, M., & Pamudji, S. (2009). PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN. *Value Added*, 5(2), 52–73.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 72(12), 38–42.
- Yusof, K. M. (2016). *Fraudulent Financial Reporting: An Application of Fraud Models to Malaysian Public Listed Companies Being a Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull by Khairusany Mohamed Yusof B. Acc (Honours), Universiti Sain*.